

RELEVANSI KOMPETENSI LULUSAN SMK DENGAN TUNTUTAN DUNIA KERJA.

Ricky Gunawan

Jurusan Teknik Mesin FPTK UPI

Email: labtek_rtu@upi.edu

Abstrak

Penelitian sebelumnya oleh Budi Sulistiono (1998) menemukan bahwa terjadi kesenjangan antara kompetensi siswa SMK terhadap tuntutan dunia kerja. Budi menjelaskan bahwa kemampuan lulusan SMK hanya memberikan kontribusi sebesar 8,01% terhadap kemampuan yang diharapkan oleh dunia kerja dan 91,99% dipenuhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya berdasarkan data Balitbang Depdiknas (1999) mengungkapkan bahwa angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU/SMK yaitu sebesar 25,47%. Ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi kita semua sebagai praktisi di bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya kualitas lulusan SMK terhadap tuntutan dunia kerja satu diantaranya adalah kompetensi tenaga pendidik. Oleh karena itu, sebagai bahan pemikiran bagi pendidik, calon pendidik dan praktisi dalam bidang PTK, pada tulisan ini akan paparkan secara singkat mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik PTK dan alternatif solusi tentang rendahnya kualitas lulusan SMK dikaitkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Kata kunci: Relevansi, Kompetensi SMK, Dunia kerja

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam era perdagangan bebas merupakan kebutuhan yang krusial dan penting bagi bangsa Indonesia. Dikatakan demikian, karena dengan SDM yang berkualitas bangsa Indonesia akan memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja, dan mampu menghadapi tantangan serta hambatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan adanya penyiapan SDM yang berkualitas. Salah satu bentuk kongkrit yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

Jenis pendidikan yang mutu lulusannya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hal tersebut sesuai dengan tujuan dari kurikulum SMK 2004, yang diantaranya disebutkan :

“.....mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam program keahliannya, agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah; serta mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam program keahliannya”.

Kemajuan yang diharapkan dari tujuan pendidikan SMK, harus terdapat *Link and Match* dengan kebutuhan industri yang masih banyak memerlukan tenaga terampil tingkat menengah, dengan maksud dapat mengisi pekerjaan tenaga-tenaga pelaksana di bidang keahliannya masing-masing. Pada kenyataan sesungguhnya di lapangan, banyak terdapat lulusan SMK yang belum mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini Oemar Hamalik (1990 : 31) mengemukakan bahwa : “Lulusan SMK banyak yang menganggur karena ketidakcocokan pemakaian dalam dunia kerja, serta kurangnya ketrampilan, pengetahuan, dan sikap dalam pergaulan”. Sementara itu Tim Asosiasi Manajer (AMA) Indonesia mengemukakan bahwa : “Lulusan sekolah di Indonesia tidak siap pakai sehingga industri masih harus melakukan berbagai macam pelatihan dan pengembangan SDM-nya”. Pada kesempatan lain, Budi Sulistiono (1998 : 60) mengemukakan bahwa: “Kemampuan lulusan SMK memberikan kontribusi sebesar 8,01% terhadap kemampuan yang diharapkan oleh perusahaan (dunia kerja) dan 91,99% dipenuhi oleh faktor-faktor lain”. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan lulusan SMK belum memenuhi target sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan (dunia kerja).

Selaras dengan hal tersebut di atas, Uwe Schippers dalam Yusup Supratman (1996 : 4) menyatakan bahwa di Departemen Tenaga Kerja berlaku rumus umum, yaitu, 2 :1 yang digunakan untuk mengilustrasikan situasi pasar kerja sekarang, yang menyatakan bahwa ada 2 posisi kosong yang diperebutkan, tetapi yang diterima hanya 1 orang, karena yang 1 orang itulah yang memiliki kualifikasi yang mendekati. Sementara itu berdasarkan data Balitbang Depdiknas (1999) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU/SMK yaitu sebesar 25,47 %, sehingga hal ini menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri (www.edents.bravepages.com:2002). Dengan demikian menumpuknya lulusan SMK yang belum bekerja memperlihatkan bahwa secara kuantitatif tersedia cukup tenaga kerja, tetapi tidak secara kualitatif.

Ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi kita semua sebagai praktisi di bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya kualitas lulusan SMK terhadap tuntutan dunia kerja satu diantaranya adalah kompetensi tenaga pendidik (guru). Guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah dan guru juga bertanggung jawab penuh pada ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Begitu pentingnya peranan guru, sehingga Hamalik (2002) mengemukakan bahwa mutu guru turut menentukan kualitas SDM. Oleh karena itu, peningkatan mutu guru merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kemampuan dasar mengajar yang menjadi ciri keprofesionalan guru. Demikian pula dalam UU guru dan dosen Bab V pasal 8 mengatur tentang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik; kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; sedangkan kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Berkaitan dengan hal di atas, Aqib (2002) menjelaskan bahwa seorang guru juga diharapkan harus memiliki kemampuan dasar mengajar. Kemampuan tersebut diidentifikasi sebagai sepuluh kemampuan atau kompetensi dasar profesional guru. Kesepuluh kemampuan dasar profesional guru tersebut antara lain: (1) menguasai bahan pelajaran, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media pembelajaran, (5) menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan

pembelajaran, (8) mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, serta penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pembelajaran. Kesepuluh kemampuan dasar mengajar tersebut merupakan kompetensi dasar mengajar guru di Indonesia (Sudjana, 1988). Setiap guru diharapkan dapat melaksanakan dan memahami kesepuluh kemampuan dasar mengajar tersebut. Hal ini dapat dijadikan tolok ukur kinerjanya sebagai guru yang profesional dalam upaya meningkatkan hasil kegiatan pembelajarannya.

Secara faktual, kesepuluh kompetensi tersebut belum banyak dikuasai oleh guru atau sebagian guru ada yang telah menguasai tetapi mutunya masih belum memadai atau hanya sebagian guru yang menguasai sebagian kompetensi dasar mengajar tersebut dengan baik (Sumana, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru pada umumnya belum sepenuhnya melaksanakan kesepuluh kompetensi dasar mengajar tersebut. Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Baskoro (2006) mengungkapkan bahwa hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah, yang tidak layak mengajar atau menjadi guru berjumlah 912.505, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Selanjutnya tercatat 15 persen guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Tentu saja hasil tersebut sangat memprihatinkan dan perlu upaya perbaikan dari berbagai pihak.

Alternatif Solusi Masalah Rendahnya Kualitas Lulusan SMK

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas lulusan SMK satu diantaranya dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pendidik. Kompetensi tenaga pendidik dan kualitas lulusan yang dihasilkannya tidak akan terlepas dari mutu pendidikan secara menyeluruh. Menurut Coombs (1985) bahwa suatu pendidikan kejuruan bermutu apabila para siswa yang telah mengalami proses pendidikan tersebut dapat di terima di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalogikan bahwa SMK sebagai penghasil lulusan harus mampu menjadikan setiap individu siswa memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja. Jadi langkah pertama dalam upaya menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas adalah pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Selain itu juga diperlukan manajemen yang baik, monitoring dan

kegiatan-kegiatan perbaikannya. Dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan unggul, peran pendidikan sangat penting dan strategis. Untuk itu bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Tilaar (1998) apabila bidang pendidikan tidak mendapatkan perhatian dan prioritas, maka kualitas lulusannya tidak akan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, baik pada tingkat regional, maupun internasional. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka sistem pendidikan yang dibangun pun harus yang berkualitas pula.

Dari sekian banyak kriteria yang mencirikan sistem pendidikan yang berkualitas satu diantaranya adalah tersedianya tenaga pendidik/guru yang profesional dan berkualitas. Posisi guru adalah ujung tombak pendidikan, karena secara langsung berhubungan dengan peserta didik. Peningkatan kualitas dan profesional tenaga pendidik mutlak dilakukan dan hal ini ditegaskan dalam Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja. Oleh karena itu, solusi kedua yang perlu dilakukan agar memperoleh lulusan SMK yang berkualitas adalah pemerintah harus mengupayakan membuat kebijakan lebih lanjut untuk dapat meningkatkan kemampuan tenaga pendidik melalui pola pembinaan intensif dan berkesinambungan. Satu diantaranya adalah dengan kegiatan yang bersifat *in service education*, yakni melalui kegiatan penataran dan diklat-diklat yang khusus ditujukan bagi tenaga pendidik PTK. Morant (1981) berpendapat bahwa *in service education* adalah pendidikan tambahan yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan bantuan bagi guru-guru dalam mengembangkan keahlian dan penguasaan kemampuan kerja yang optimal. Selain itu, mengingat bahwa pencapaian tingkatan kualitas tenaga pendidik sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Efektivitas salah satunya diukur melalui evaluasi terhadap tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga pendidik. Selanjutnya perlu pula diusahakan pembinaan dan penerangan mengenai peningkatan mutu pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun antar sekolah pada lingkup yang lebih luas. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan

pencapaian kompetensi peserta didik diperlukan peningkatan kemampuan guru melalui pemahaman terhadap profesi keguruan, menambah wawasan keilmuan dan berkonsentrasi terhadap beban tugas mengajar yang menjadi tanggungjawabnya.

Kesimpulan

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya. Sebagai agen pembelajaran, pendidik harus memiliki (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik adalah melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, yaitu melalui program pelatihan, penataran, magang industri dan lainnya. Meningkatnya kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan, sehingga kompetensinya relevan dengan apa yang dituntut oleh dunia kerja.

Daftar Pustaka

- Aqib, Zainal. 2002. *profesionalisme Guru dalam Pembelajarn*.
Surabaya: Insan Cendikia.
- Baskoro, P.E. 2006. *Guru Profesional, adakah?*. www.kompas.com. opini.
Diakses tanggal 14 November 2006.
- Coombs, Leonard. 1985. *Vocational Education and Training in The Developed World*.
London and New York: Routledge
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidkian Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*.
Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____. (1990). *Pendidikan Tenaga Kerja Nasional*. Jakarta : PT. Citra
Adiya Bhakti.
- Morant, Roland W. 1981. *In Service education within the School*.
London: George Allen &Unwim.
- Sudjana, Nana. 1988. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Sumana, A. 1994. *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanesus

- Supratman, Yusup. (1996). *Kesesuaian Kurikulum STM Program Studi Bangunan Gedung dengan Tuntutan Dunia Kerja*. Tesis. FPS IKIP Bandung.
- Sulistiono, Budi. (1998). *Keterkaitan Antara Kemampuan Lulusan SMK Rumpun Bangunan dengan Kemampuan Yang Diharapkan Oleh Perusahaan Jasa Konsultan di Kodya Bandung*. Skripsi. Bandung : UPI
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Jakarta: Tera Indonesia.